

BAB V

SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan simpulan dari hasil penelitian dan kajian peneliti mengenai "Impelementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Masyarakat Kecamatan Cisarupan Kab. Garut". Simpulan yang ada pada bab ini yaitu data, yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan. Kemudian peneliti olah dan tulis kedalam bentuk karya tulis ilmiah ini. Selain simpulan, peneliti juga membuat implikasi dan rekomendasi yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait dan berkepentingan serta pihak-pihak yang tertarik pada penelitian ini. Dimana isi dalam bab ini yaitu menjelaskan inti dari jawaban yang telah didapat dari rumusan-rumusan masalah yang telah dikumpulkan dan juga diambil melalui fakta dan juga data yang didapatkan di lapangan. Serta saran untuk peneliti sendiri selanjutnya dengan harapan akan ada perbaikan dan pengembangan terhadap penelitian tersebut. Sehingga ini merupakan simpulan, implikasi dan juga rekomendasinya yaitu sebagai berikut.

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Sesuai dengan apa yang telah dihasilkan dari penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan secara umum, yaitu kebijakan Program Keluarga Harapan disektor pelayanan publik yang ditunjukkan untuk menanggulangi kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan pelayanan publik yang menitikberatkan pada peningkatan sumber daya manusia yaitu melalui pendidikan dan kesehatan. Pada implementasinya Progam Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisarupan telah cukup berhasil dalam pelaksanaannya dimana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisarupan telah mengurangi beban rumah tangga miskin dalam pemenuhan pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan bagi lansia diatas 70 tahun dan disabilitas berat. Namun belum sepenuhnya dapat dikatakan efektif hal tersebut dibuktikan dengan data dari hasil wawancara, observasi dan juga studi dokumentasi

di lapangan bahwa beberapa masyarakat masih ada yang merasa bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) belum tepat sasaran pada kenyataannya di lapangan dan juga tanggungjawab masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai KPM belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Serta masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya seperti pada kelengkapan administrasi dari masyarakat sebagai kewajiban peserta PKH.

Pada pelaksanaannya Program Keluarga Harapan (PKH) ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Karena melalui pendidikan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas sumber daya. Karena jika sumber daya manusia meningkat kemungkinan besar taraf hidup pun meningkat. Pada pelaksanaan PKH di Kecamatan Ciburupan masyarakat sudah cukup memiliki tanggungjawab dalam melakukan kewajibannya, namun belum sepenuhnya masyarakat memiliki kesadaran akan tanggungjawab dalam melaksanakan kewajiban sebagai KPM. Maka dari itu perlu ditingkatkan laginya *civic responsibility* masyarakat atau tanggungjawab masyarakat terhadap hak dan kewajibannya seperti dengan lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan serta lebih menekankan pada hak dan tanggungjawab sebagai KPM. Dapat juga ditingkatkan melalui pendidikan seperti melalui Pendidikan Kewarganegaraan sejak dini.

5.1.2 Simpulan Khusus

Berdasarkan dari simpulan umum di atas, dalam hal ini peneliti mengemukakan beberapa simpulan khusus yang akan diuraikan dalam bentuk penjabaran per-rumusan masalah dikaji dari teori yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai dengan menetapkan lokasi dimana akan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH) ini yang mana penetapan lokasi ini ditentukan oleh kementerian sosial. Selanjutnya dalam pelaksanaannya Program Keluarga Harapan (PKH) ini dijalankan setelah data masyarakat di validasi untuk menentukan KPM, setelah KPM dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini ditentukan maka para pendamping akan mulai melakukan sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana sosialisasi dilakukan setiap satu bulan sekali serta

membantu KPM dalam pembuatan rekening. Program Keluarga Harapan (PKH) dalam proses pencairan dana bantuan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) setiap 3 bulan sekali akan dilakukan pemutakhiran data guna selalu mendapatkan data terbaru dari KPM. Kemudian proses evaluasi pada Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan setiap satu bulan sekali untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang hadir pada saat pelaksanaan serta untuk memantau jalannya Program Keluarga Harapan (PKH) ini.

2. Dilihat secara keseluruhan dari hasil penelitian Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah cukup efektif namun belum sepenuhnya efektif. Program Keluarga Harapan (PKH) sudah efektif dalam membantu masyarakat yang tergolong kedalam masyarakat tidak mampu. Namun dilihat dari tanggungjawab masyarakat belum sepenuhnya efektif, masih kurangnya tanggungjawab masyarakat dalam beberapa hal seperti pada administrasi walaupun pada pengelolaan dana bantuan masyarakat sudah mampu bertanggungjawab namun tidak sepenuhnya dapat dikatakan bahwa KPM sudah bertanggungjawab secara penuh.
3. Upaya dalam Program Keluarga Harapan (PKH), bahwa upaya sederhana yang dapat dilakukan oleh para pelaksana untuk mengatasi hambatan yang di alami yaitu dengan sosialisasi lebih ditekankan lagi terlebih tentang hak dan kewajiban sebagai KPM. Menuntun masyarakat bahwa setelah mendapatkan hak maka ada kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan.

5.2 Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini dapat peneliti rumuskan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) ini pada pelaksanaannya sudah menjalin komunikasi yang baik antara pendamping dengan masyarakat dibuktikan dengan selalu melakukan sosialisasi setiap bulannya serta pendamping memberikan faasilitas untuk masyarakat melakukan pengaduan atau keluhan terkait dengan PKH ini berupa kantor UPPKH, hal ini berimplikasi pada keberhasilan dari

pelaksanaan program ini. Karena dengan adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara pelaksanaan dengan masyarakat dapat meningkatkan koordinasi diantara keduanya, dengan demikian komunikasi dapat mendukung pencapaian tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini.

2. Temuan penelitian membuktikan dalam melaksanakan Program Harapan (PKH) ini data masyarakat harus sinkron antara data yang ada di masyarakat dengan data yang ada di DTKS atau pemerintah, hal ini berimplikasi pada ketepatan sasaran dari program ini, dengan data yang sinkron diantara keduanya maka kecil kemungkinan untuk salah dalam menentukan sasaran dari PKH ini. Karena sasaran merupakan bagian yang penting dalam mencapai tujuan dari suatu kebijakan, sehingga untuk mencapai tujuan dari kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sasaran yang ditentukan harus tepat dalam pelaksanaannya di lapangan.
3. Temuan penelitian membuktikan upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dirasakan pada saat pelaksanaan terutama pada pengembangan *civic responsibility* guna menunjang keberhasilan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu dengan memupuk kesadaran dan tanggungjawab melalui pendidikan serta lebih giat dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan. Oleh karena itu, berimplikasi mengaktifkan pembelajaran PKn mengenai *civic responsibility*. Karena dengan mempelajari tanggungjawab dari masyarakat sejak dini dapat memberikan dampak yang besar pada kehidupannya kelak, dengan menanamkan sikap tanggungjawab pada masyarakat maka akan menumbuhkan kesadaran pada diri masyarakat sebagai warga negara akan kewajibannya.

5.3 Rekomendasi

Pada sub bab rekomendasi ini, peneliti memberikan rekomendasi yang terkait dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan pada masyarakat di Kecamatan Cisurupan Kab. Garut” yang diharapkan menjadi perbaikan dan juga pengingat untuk kedepannya bagi setiap pihak serta bisa menjadi referensi untuk kedepannya. Untuk rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

5.3.1 Bagi Dinas Sosial Kabupaten Garut

Elba Noorbayinah, 2022

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN CISURUPAN KAB.GARUT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Melakukan peninjauan yang lebih teliti lagi terkait pendataan masyarakat guna menentukan mana masyarakat yang berhak dan pantas untuk menerima bantuan PKH ini atau tidak. Hal ini dapat dilakukan pada proses pemutakhiran data yang dilaksanakan pada proses perencanaan dari PKH ini. Dengan demikian akan terciptanya rasa keadilan di masyarakat karena penerima manfaat PKH ini akan sesuai dengan targetnya.

5.3.2 Bagi Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Cisarupan

Melakukan sosialisasi dan juga edukasi terhadap masyarakat terkait dengan pentingnya hak dan kewajiban sebagai KPM. Dengan adanya sosialisasi dan juga edukasi ini diharapkan dapat menjadi faktor penting dalam meningkatnya pengembangan *civic responsibility* Masyarakat Kecamatan Cisarupan. Sosialisasi ini dapat dilaksanakan ketika memberikan pendampingan secara rutin pada setiap bulannya dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya ketika mendapatkan hak sebagai KPM maka akan terdapat kewajiban juga yang harus dilakukan sehingga terciptanya masyarakat yang memiliki kesadaran akan tanggungjawab.

5.3.3 Bagi Kecamatan Cisarupan

Memberikan jalan keluar bagi masyarakat dalam pembaruan data, pasalnya yang menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan PKH yaitu administrasi dari masyarakat terkait data yang kurang lengkap. Dalam hal ini yang menjadi kendala adalah masyarakat yang kurang memahami teknologi masa kini karena sebagian besar dari masyarakat penerima manfaat bantuan adalah orang tua yang kurang memahami teknologi, karena pada masa pandemi hal-hal terkait pembaruan data yang biasanya dilakukan di kantor desa maupun dikecamatan dilakukan secara online. Maka perlu dilakukan arahan kepada masyarakat tentang bagaimana cara pembaruan data secara online dengan melakukan sosialisasi. Hal ini dapat dilaksanakan dengan melakukan beberapa kali sosialisasi dengan membagi kepada kelompok kecil guna menghindari terjadinya penyebaran covid-19.

5.3.4 Bagi Masyarakat Kecamatan Cisarupan

1. Lebih pro aktif dalam memenuhi kelengkapan data administrasi sebagai bentuk tanggungjawab sebagai KPM.

2. Memaksimalkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dari yang sudah dilaksanakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat kecamatan Cisarupan.

5.3.5 Bagi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan

Lebih mengembangkan lagi dalam penelitian terkait dengan *civic responsibility* karena tidak begitu banyak penelitian yang menyangkut hal tersebut. Memberikan kesempatan lebih banyak pada mahasiswa untuk mengkaji suatu permasalahan yang menyangkut dengan *civic responsibility* atau tanggungjawab warga negara.

5.3.6 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Bagusnya untuk melakukan pra penelitian terlebih dahulu dalam meninjau lokasi dengan lebih detail, supaya tidak terjadi kesalahan dan juga kekurangan data pada saat pelaksanaan penelitian.
2. Membuat rencana terkait penelitian tentang program kebijakan publik lebih spesifik lagi, sehingga dalam pelaksanaannya lebih mendalam lagi untuk dilakukan penelitian.

Untuk penelitian selanjutnya agar lebih mendalami lagi terkait dengan tanggung jawab warga negara atau *civic responsibility*.